



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2020

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 telah dapat kami selesaikan.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Perangkat Daerah (PD) selaku entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja PD merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten menjadi tolak ukur keberhasilan.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas guna mewujudkan Pemerintahan yang “Good Governance” dalam peneyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada msyarakat Tahun 2020, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020.

Tanjung Balai Karimun, 22 Maret 2021



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Data Organisasi	6
1. Tugas Pokok	6
2. Fungsi	7
3. Sumber Daya	7
4. Struktur Organisasi	8
5. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021	11
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	14
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.3 Perjanjian Kinerja 2020	18
2.4 Perencanaan Anggaran 2020	19



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1	Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.1.1	Analisis Capaian Kinerja	26
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja Anggaran	45
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan.....	53

- Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
 2. Rencana Aksi Tahun 2020
 3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2020



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 ini disusun.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi, walaupun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan kinerja. Namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, serta berdasarkan Visi Kabupaten Karimun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”***, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 mengemban Misi Ke-4 adalah ***Membangun sumber daya manusia yang***



sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Dengan uraian misi yakni :

- **“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas”** adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, dua sektor utama yang paling berperan guna membangunnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan.
- **“Kompetitif”** dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun, ditambah lagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk dikedepankan.
- **“Menjawab kebutuhan daerah”** dimaksudkan sebagai standar kualifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari **“menjawab kebutuhan daerah”** adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan, perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

Dalam Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah melaksanakan program dan kegiatan utama dengan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :



No	Tujuan / Sasaran / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal				
	Indikator Kinerja Utama : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,98	59,76	98,00
	2. Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	%	3,8	3,77	99,21
2.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja				
	Indikator Kinerja Utama : Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	13	25,36	195,07
3.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran : Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten				
	Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	%	15,9	0	0
4	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja				
	Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	%	30	20	150
	2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	35,4	86,70	244,91



Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan baik program pendukung visi dan misi Kabupaten Karimun dan program penunjang disediakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp,6,224,946,068.41,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2,778,097,068.41,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3,436,849,000,00, namun terjadi perubahan anggaran pada APBD-P menjadi Rp.6,320,474,776.94,00 atau 101,53% terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.3,188,694,976.94,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3,131,779,800,00.00 terealisasi sebesar 86,63% atau Rp.2,717,975,565,00.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan system pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu system pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga untuk mengomunikasikan



capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, serta harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kewajiban setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selain menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun, juga menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, penyusunan IKU wajib



bagi unit kerja. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur dari Renstra. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini juga menjadi penting artinya sebagai salah satu untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan



pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Bupati Karimun atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Data Organisasi

Dalam kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memiliki kewenangan untuk mengelola belanja daerah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai lembaga Pemerintah di Daerah, keberadaan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun bertumpu pada kekuatan yang dimiliki Organisasi Tugas Fungsi, data Pegawai dan data Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dinas Daerah, untuk itu akan dijelaskan kedalam 4 Aspek yaitu : (1) Tugas Pokok (2) Fungsi (3) Data Pegawai (4) Struktur Organisasi.

1. Tugas pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- 1) Merumuskan perencanaan, kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;



- 2) Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 3) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- 4) Melaksanakan kegiatan lain di Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh Bupati.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- 2) Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

3. Sumber Daya

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 Pegawai yang mana 24 (dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 (dua puluh lima) orang pegawai kontrak/PTT, dengan rincian pegawai sebagai berikut :

No	Pendidikan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	PTT	Jumlah
1	S-3	-	-	-	-	-	-
2	S-2	4	1	-	-	-	5
3	S-1/DIV	6	5	-	-	8	19



4	D III	-	1	-	-	-	1
5	SMA	-	1	7	-	16	24
6	SMP	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10	8	7		24	49

Dengan Susunan kedudukan pegawai sebagai berikut :

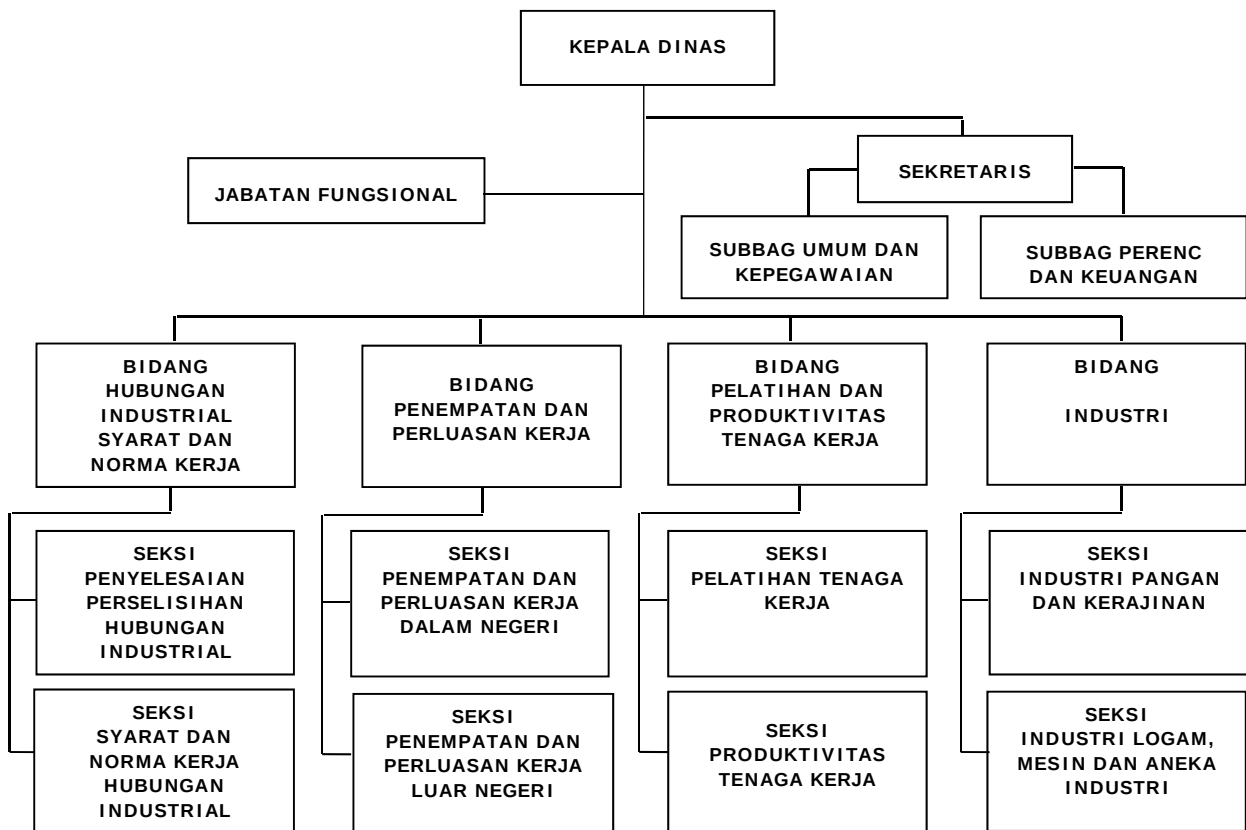
No	Jabatan	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	PTT	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris	1					1
3	Kepala Bidang	2	2				4
4	Kepala Seksi	1	5				6
5	Kepala Subbagian		2				2
6	Pelaksana		5	5		25	34
7	Fungsional						
	Jumlah	5	14	5		25	49

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANSASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN



5. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun selama Tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun serta struktur organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 meliputi RPJMD Kabupaten Karimun 2016 – 2021, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, Menjelaskan menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020;
4. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

Kebijakan Nasional yang tertuang dalam *Millenium Development Goal's* salah satunya menekankan kepada penanggulangan kemiskinan dan telah dirumuskan pada Goal's 1 yaitu menanggulangi tingkat kemiskinan dan kelaparan.

Kebijakan Daerah Kabupaten Karimun menekankan kepada Pencapaian Target MDG's juga adalah tanggung jawab kabupaten/kota. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif terhadap penduduk miskin dan daerah tertinggal harus menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya diperlukan ketersediaan data yang akurat dan lengkap serta program yang terpadu. Diperlukan kebijakan yang komprehensif.



Di urusan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun lebih memfokuskan kepada pemberian pelatihan dengan kualitas pelayanan yang memuaskan sebagai upaya agar para pencari kerja tidak lagi tergantung kepada ketersediaan lapangan kerja yang relatif sempit dan tidak sesuai dengan laju kenaikan angka pencari kerja di Kabupaten Karimun.

Di urusan perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun menitik beratkan pada Wirausahabaru (WUB) yakni Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Untuk itu dibutuhkan Rencana Strategis atau yang disebut dengan Renstra yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka



menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi adalah merupakan suatu gambaran yang menaentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Karimun saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan Visi Kabupaten Karimun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu, ***"Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Pernyataan visi dimaksud adalah merupakan harapan dimasa depan tentang peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam memberikan



kontribusi terhadap upaya peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus dapat mendinamisasikan dan menstimulasikan masyarakat untuk memanfaatkan setiap kesempatan kerja sehingga dapat memperoleh penghasilan yang layak sehingga pada akhirnya ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan sosial yang berkualitas, mandiri dan bermartabat dapat secepatnya terwujud.

2.1.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan madat yang diberikannya.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Terdepan dalam Daya Saing).
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (Terdepan dalam Bidang Ekonomi).
3. Memperkuat konktivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (Terdepan dalam Infrastruktur).



4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan).
5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (Terdepan dalam Melestarikan Lingkungan Hidup).
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (Terdepan dalam Budaya dan Keagamaan).
7. Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani. (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi).

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mengemban misi ke-4 yakni :

“Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan)”.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun **tujuan** yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah menurunkan angka pengangguran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam



jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun Sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun meliputi :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja.
3. Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten.
4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun dengan maksud dan tujuan yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada Perjanjian Kinerja adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4
1	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
			Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
		Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wira Usaha Baru
		Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial diluar Pengadilan Perselisihan Hubungan Indusrtial (PPHI)
			Persentase Tenaga Kerja Yang Menjadi Peserta Jaminan Sosisal Tenaga Kerja



2.3 Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Sasaran I Meningkatkan Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,98
Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	%	3,8



Sasaran II Meningkatkan Kesempatan dan Perluasan Kerja		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
Tingkat Pertumbuhan Wirausahabaru	%	13

Sasaran III Meningkatkan Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten	%	15,9

Sasaran IV Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Lokal		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	%	30
Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	35,4

2.4 Perencanaan Anggaran 2020

Program dan Kegiatan Mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun

1. Sasaran I

Meningkatkan Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal

Indikator Kinerja Utama :

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **60,98%**
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan : -



- Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal **3,8%**

- a. Program Peningkatan dan Perluasan Kerja

Kegiatan : Operasional Informasi Pasar Kerja

Anggaran Rp. 50,000,000,00.

2. Sasaran II

Meningkatkan Kesempatan dan Perluasan Kerja

Indikator Kinerja Utama :

- Tingkat Pertumbuhan Wirausahabaru **13%**

- a. Program Peningkatan dan Perluasan Kerja

Kegiatan : Tenaga Kerja Mandiri

Anggaran Rp. 150,000,000,-

- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan : Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Anggaran Rp. 395,000,000,-

Kegiatan : Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)

Anggaran Rp.200,000,000,-

Kegiatan : Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah

Anggaran Rp.200.000.000,-

Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah

Anggaran Rp.160.000.000,-

- c. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim

Anggaran Rp,190.000.000,-



Kegiatan : Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian

Anggaran : Rp.150.000.000,-

3. Sasaran III

Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten **15,9%**
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan : Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja.
 - Anggaran Rp.200.000.000,-
 - Kegiatan : Pelatihan Las Dasar
 - Anggaran Rp.200.000.000,-

4. Sasaran IV

Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Lokal

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) **30%**
 - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - Kegiatan : Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun
 - Anggaran Rp.160.000.000,-
- Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja **35,4%**
 - Kegiatan : Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit



Anggaran Rp.130.000.000,-

Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran Meningkatnya Kinerja Disnakerind

Indikator : Nilai Akip **>70**

Kegiatan : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)

Anggaran Rp.40.000.000,-

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran Telaksananya Pelayanan Umum Perkantoran

Indikator : Realisasi Pemenuhan Rencana Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional
Perkantoran

Anggaran Rp.766.849.000,-

3. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen : **2 Dokumen**

Kegiatan : Penyusunan Renja

Anggara Rp.25.000.000,-

Kegiatan : Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran
Indikator Kinerja OPD.

Anggaran Rp.35.000.000,-



4. Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan

Indikator : Persentase OPD dalam melaksanakan Pemutakhiran Data/Informasi

100%

Kegiatan : Operasional Web Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Anggaran Rp.45.000.000,-

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran : Meningkatnya Disiplin Pegawai Disnakerind

Indikator : Tingkat Disiplin Pegawai 98%

Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran Rp.50.000.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan



capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan. Laporan Kinerja PD ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Selain itu, laporan ini dimasukkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya, Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang dibawah target, untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2020 dan atau tahun-tahun selanjutnya secara ringkas capaian per tujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN APBD TAHUN 2020
(PERJANJIAN KINERJA)**

No	Tujuan / Sasaran / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal				
	Indikator Kinerja Utama : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,98	59,76	98,00
	2. Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	%	3,8	3,77	99,21



2.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran II : Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja				
	Indikator Kinerja Utama : Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	13	25,36	195,07
3.	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran III : Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten				
	Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	%	15,9	0	0
4	Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial				
	Sasaran IV : Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja				
	Indikator Kinerja Utama :				
	1. Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	%	30	20	150
	2. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	35,4	86,70	244,91

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, terdapat 1 (satu) Misi dan 1 (satu) Tujuan, serta 4 (empat) Sasaran Strategis, adapun analisa dari ketiga Sasaran Strategis untuk mencapai 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) IKU dari Dinas



Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun akan diuraikan sebagai berikut :



**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2018 s.d 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi			Capaian		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,98%	63,31	58,09%	59,76%	105%	95,68%	98,00%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,8%	3,7%	3,29%	3,77%	103%	88,92%	99,21%
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	13%	6%	7,30%	25,36%	75%	66,36%	195,07%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	15,9%	16,1%	16,92%	0	108%	110%	0
4.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	30%	33%	58,3%	20%	122%	201%	150%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35.4%	29,1%	41,38%	86,70%	83,7%	118%	244,91%



Perbandingan Antara Anggaran dan Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program / Kegiatan	Anggaran			Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	60,98%	59,76%	98,00%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	50,000,000	49,847,007	99,69%	3,8%	3,77%	99,21%
			1. Operasional Informasi Pasar Kerja	50,000,000	49,847,007	99,69%			
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	150,000,000	146,177,199	97,45%	13%	25,36%	195,07%
			1. Tenaga Kerja Mandiri	150,000,000	146,177,199	97,45%			
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	905,000,000	547,639,500	60,51%			
			1. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	395,000,000	240,031,000	60,76%			
			2. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)	150,000,000	147,816,500	98,54%			
			3. Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah	200,000,000	0	0			
			4. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	160,000,000	159,792,000	99,87%			
			Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	340,000,000	189,937,799	55,86%			



			1. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	190,000,000	189,937,799	99,96%			
			2. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian	150,000,000	0	0			
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	700,000,000	64,860,500	9,26%	15,9%	0	0
			1. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	200,000,000	5,696,000	2,84%			
			2. Pelatihan Las Dasar	300,000,000	10,501,000	3,50%			
			3. Pelatihan Scaffolding	200,000,000	48,663,500	24,33%			
4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	290,000,000	245,427,800	84,63%	30%	20%	150%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja					35.4%	86,70%	244,91%
			1. Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun	160,000,000	135,841,800	84,90%			
			2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	130,000,000	109,586,000	84,29%			



PENGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG TAHUN 2020

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran			Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	5	6				7	8	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan benar di Lingkungan Disnakerind	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	40,000,000	39,953,200	99,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	766,849,000	827,871,700	107,95%	18 Jenis	18 Jenis	100%
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renja	25,000,000	23,783,800	95,13%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	50,000,000	39,989,200	79,97%	1 Dokumen / 2 Laporan	1 Dokumen / 2 laporan	100%
		Program Pengembangan Data/Informasi	Operasional Web Ketenagakerjaan dan Perindustrian	70,000,000	59,999,400	85,71%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	48,319,260	96,63%	7 Unit	7 Unit	100%



3.1.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal

Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis I
Tingkat Capaian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.98 %	59.76 %	98.00 %
2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3.8 %	3.77 %	99.21 %
Rata-rata Tingkat Capaian				98.61 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata dari dua indikator adalah sebesar 98,61 persen. Nilai menunjukkan bahwa hasil capaian mendekati dari target yang ditentukan atau dikatakan baik. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh melalui ***persentase*** dari ***jumlah angkatan kerja*** terhadap ***jumlah penduduk usia kerja*** dengan formula :

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} = X 100 \%$$

Untuk Memperoleh formula diatas dapat kami jelaskan sebagai mana tabel berikut :



Tabel 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	89.590	86.236	175.826
Angkatan Kerja	69.705	35.376	105.081
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			59,76

Sumber ; BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020

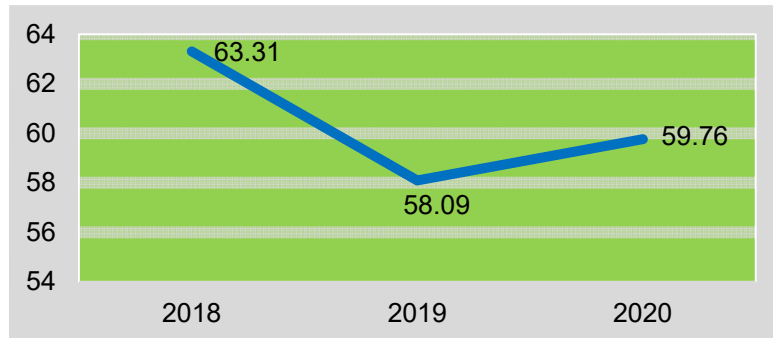
Pada tabel diatas bahwa Jumlah Angkatan Kerja berjumlah 105.081 jiwa, sementara jumlah Penduduk Usia Kerja berjumlah 175.826 jiwa dengan demikian realisasinya **59,76 persen**, atau

$$TPAK = \frac{105.081 \text{ jiwa}}{175.826 \text{ jiwa}} \times 100 \% = \mathbf{59,76 \%}$$

Untuk itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun pada Tahun 2020 yakni **59,76 persen**

Berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun Tahun 2018 – 2020 pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018 - 2020



Sumber ; BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020

Sebagaimana gambar diatas bahwa TPAK pada tahun 2018 sebesar 63,31 persen terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2019 menjadi 58,09 persen, namun terjadi peningkatan di tahun 2020 walaupun pada masa Pandemi Covid-19 sebesar 59.76 persen.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Secara langsung. naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kabupaten Karimun.
- Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Karimun dimasa pandemi covid-19 sedikit mengalami penurunan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan namun ada juga perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan karena adanya proyek-proyek baru yang mengakibatkan penambahan tenaga kerja sehingga kenaikan TPAK tidak begitu signifikan yaitu naik 1,67% dari tahun sebelumnya.



2) *Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal*

Pada Tahun 2020 Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal (P3TKL) sebesar **3,77 persen** diperoleh dengan formula :

$$P3TKL = \text{Persentase Penerimaan Thn ini [dikurangi] Persentase Penerimaan Thn lalu}$$

Dengan formula diatas dapat kami jelaskan bahwa :

Pada tahun tahun 2019 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 1.566 orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 639 orang dengan demikian $639/1.566 \times 100\% = 40,80\%$. Sementara pada tahun 2020 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 2.576 orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 1.148 orang dengan demikian $1.148/2.576 \times 100\% = 44,57\%$, atau pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tingkat Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal

Tahun 2019			Tahun 2020		
Pendaftar	Ditempatkan	Realisasi (persentase penerimaan thn lalu)	Pendaftar	Ditempatkan	Realisasi (persentase penerimaan thn ini)
1.566	639	40,80%	2.576	1.148	44,57%

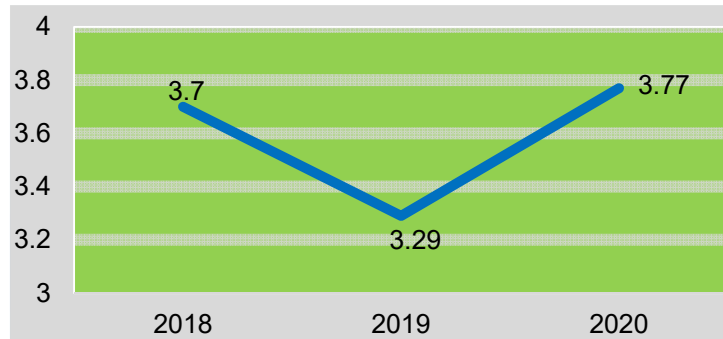
Sebagaimana pada formula dan tabel diatas maka :

$$P3TKL = 44,57\% - 40,80\% = 3,77\%$$

Untuk itu Realisasi **Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal** pada tahun tahun 2020 sebesar **3.77 persen**.

Adapun perkembangan peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2
Perkembangan Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
Tahun 2018 s.d 2020



Untuk Penerimaan Pencari Kerja di Kabupaten Karimun dapat kami jelaskan bahwa :

- a. Pengrekrutan tenaga kerja tidak juga melalui pemda karna pelaksanaan penempatan tenaga kerja juga boleh dilakukan oleh lembaga swasta berbadan hukum, dalam hal ini perusahaan yang merekrut tenaga kerja (Dasar Hukum Permen Transmigrasi RI Nomor : Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja BAB II Pasal 3) : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
 - (2) Lembaga Swasta yang berbadan Hukum.
- b. Masih adanya beberapa kendala seperti :
 - Masih belum stabilnya perekonomian dunia
 - Belum adanya perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar



- Masih adanya beberapa Perusahaan tidak melaporkan jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan.
- Tenaga Kerja yang direkrut oleh PT. SAIPEM tidak hanya dari Kabupaten Karimun, tapi dari luar Kabupaten Karimun dan dari lintas perusahaan.

Upaya dilakukan yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai mitra dengan perusahaan akan membentuk Tim untuk lebih kedekatan dengan Pihak perusahaan sehingga mudah mendapatkan data-data khususnya penempatan tenaga kerja sehingga terwujudnya target yang telah ditetapkan.

3.1.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja

Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula terhadap pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis II, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis II Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Wirausahabaru	13%	25,36%	195,07%

Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja dengan Indikator Tingkat Wirausaha baru dengan formula :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Wirausahabaru} = \frac{\text{Jlh IKM thn ini} - \text{Jlh IKM thn lalu}}{\text{Jlh IKM thn lalu}} \times 100\%$$

Untuk mendapatkan angka pada tabel dan formula diatas dapat kami jelaskan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Wirausahabaru (WUB)
Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Pertambahan IKM Tahun 2020
		Tahun 2019	Tahun 2020	
		(pelaku usaha)	(pelaku usaha)	
1	2	3	4	5
1	Karimun	184	211	27
2	Meral	180	198	18
3	Meral barat	37	69	32
4	Tebing	186	258	72
5	Kundur	178	231	53
6	Kundur Barat	76	109	33
7	Kundur Utara	71	91	20
8	Buru	65	105	40
9	Moro	110	121	11
10	Durai	38	38	-
11	Belat	25	32	7
12	Ungar	84	84	-
J u m l a h		1234	1547	313

Sebagaiman pada formula dan tabel diatas maka :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Wirausahabaru} = \frac{1547 - 1234 = 313}{1234} = 25,36\%$$



Analisa atas capaian indikator Sasaran Strategis II bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan IKM berjumlah 1234 IKM, sementara pada tahun 2020 berjumlah 1547 IKM. Maka realisasinya 25,36% dengan capaian **195,07%**.

3.1.1.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten

Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis III, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis III Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal Yang Berkompeten	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	15,9%	0	0

Analisa atas capaian indikator Sasaran Strategis III bahwa pada tahun 2020 tidak ada pelatihan terkait pandemi covid-19. Jenis Pelatihan yang tidak dijalankan karna refocusing terkait pandemi covid-19 yakni :

No	Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi	K e t
1.	Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	70 Orang	200,000,000	5,696,000	refocusing terkait covid-19 sehingga pagu Rp.200.000.000,-menjadi Rp.5.696.000,-
2.	Pelatihan Las Dasar	25 Orang	300,000,00	10,501,000	refocusing terkait covid-19 sehingga pagu Rp.300.000.000,- menjadi Rp.10.501.000.000,-
3.	Pelatihan Scaffolding	20 Orang	200,000,00	48,663,500	refocusing terkait covid-19 sehingga pagu



					Rp.200.000.000,- menjadi Rp.48.663..500,-
--	--	--	--	--	--

Dapat kami jelaskan bahwa terkait realisasi anggaran yang mana kegiatan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan awal namun wabah covid-19 semakin meluas secara global daerah untuk itu pelaksanaan kegiatan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

3.1.1.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja

Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis IV Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	30%	20%	150%
2.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,4%	86.69%	244.88%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				197,44 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata dari dua indikator adalah sebesar 197,44 persen. Nilai menunjukkan bahwa hasil capaian sangat baik. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :



1) **Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)**

Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dengan formula :

$$\text{Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)} = \frac{\text{Selisih jlh kasus thn ini} - \text{selisih jlh kasus thn lalu}}{\text{Selisih jlh kasus thn ini}} \times 100 \%$$

Untuk Memperoleh formula diatas dapat kami jelaskan sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.4
Selisih Jumlah Kasus Hubungan Industrial

Tahun 2019		Tahun 2020	
Kasus Tercatat	Selesai = (Selisih Jumlah Kasus)	Kasus Tercatat	Selesai = (Selisih Jumlah Kasus)
6 Kasus	5 Kasus	7 Kasus	6 Kasus

Pada tabel diatas untuk mendapatkan angka sesuai formula yakni =

$$\text{Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)} = \frac{6 - 5 = 1}{6} = 20 \%$$

Dengan hasil formula diatas maka Pesentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) adalah 20% dari target yang telah ditetapkan yakni 30% dengan capaian 150% ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Karimun telah **berhasil menurunkan perselisihan** di perusahaan-perusahaan walaupun pada masa pandemi covid-19 namun masih ada beberapa



perusahaan yang tutup namun keadaan masih kondusif terbukti tidak adanya pencatatan pemogokan, demo di Kabupaten Karimun.

Untuk Mengetahui Kasus Hubungan Industrial yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2020 sebagai mana tabel berikut :

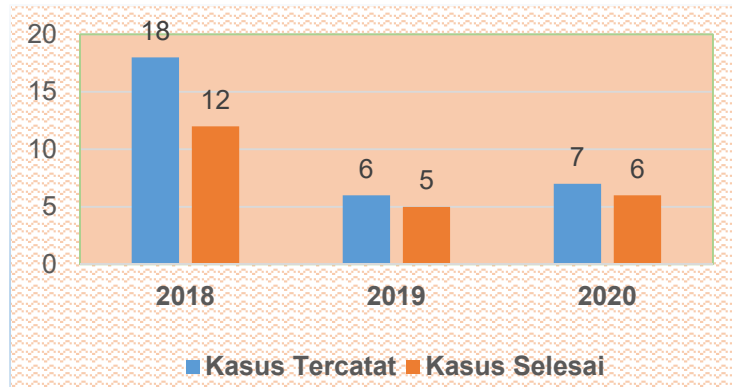
Tabel 3.5
DAFTAR PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2020

No	Tgl Pengaduan	Nama Perusahaan	Nama Pekerja	Persoalan		Alasan PHK/PHI	Proses Pemerataan			Anjuran	Keterangan		
				PHK	PHI		Pggln I	Pggln II	Pggln III		Selesai	PPHI	Anjuran
1	23-01-2020	Hotel Sangrila	EKO FADHILAH	√		Efisiensi			-	-	√		
2	29-04-2020	PT. MOS	MARTUA.S		√	Habis Kontrak	√		-			√	
3	08-05-2020	PT. MTM	SAMSUNUR		√	Tidak Kompeten	√	-	-	√	√		√
4	01-07-2020	PT. MOS	ISWARDI		√	Efisiensi	√	-	-	-	√		
5	20-07-2020	PT. TIMAH	IWAN.K		√	Status / Kepentingan	√				√		
6	16-12-2020	Bank BRI	VOPINS		√	Indisipliner	√	√			√		
7	22-12-2020	PT. MOS	M. NASIR		√	Indisipliner	√				√		

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa kasus yang tercatat sebanyak 7 kasus dan kasus yang dileselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial sebanyak 6 kasus (*selisih kasus*)

Sementara Perkembangan Kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial sebagai gambar berikut :

Gambar 3.3
Perkembangan Kasus tercatat yang diselesaikan
di luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
Tahun 2018 - 2020



Dari gambar diatas dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2018 kasus tercatat sebanyak 18 kasus yang diselesaikan sebanyak 12 kasus, sementara pada tahun 2019 jumlah kasus mengalami penurunan yang signifikan yakni sebanyak 6 kasus yang tercatat dan yang diselesaikan 5 kasus, sementara pada tahun 2020 walaupun terjadi pandemi covid-19 global namun kasus tidak begitu kenaikan yang signifikan yakni kasus tercatat sebanyak 7 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 6 kasus .

Sementara permasalahan yakni Masih ada perusahaan yang tidak mematuhi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) diantaranya perusahaan tidak konsisten dalam menerapkan Perjanjian Kerja kepada Pekerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian khususnya Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja akan tetap berupaya merangkul perusahaan dan pekerja agar tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan agar keadaan tetap kondusif dan kasus dapat diperkecil.



2) **Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Pada Tahun 2020 jumlah tenaga kerja Kabupaten Karimun sebanyak 21.696 orang atau sebesar 86.69% dari jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 18.810 orang.

Formula untuk IKU :

Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	$\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\Sigma \text{Pekerja / Buruh}} = x 100\%$
---	--

Untuk memperoleh formula diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
Peserta Penerimaa BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi
(1)	(2)	(3) 2/1x100%
18.810	21.696	86.69%

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020

Sebagaimana formula dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diatas dapat kami jelas kan kembali yakni :

Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja	$= \frac{18.810}{21.696} = 86,69\%$
---	-------------------------------------

Ketidakberhasilan indikator karena :

- Masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan akan membebani anggaran perusahaan;
- Masih ada pekerja/buruh tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan sebab akan mengurangi pendapatan/upah.



3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada Tahun 20120 secara rinci diuraikan di bawah ini :

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Program Pendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun			
A.	Sasaran I <i>Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal</i>			
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kegiatan : -	-	-	-
2	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	50,000,000	49,847,007	99,69
	Kegiatan : a. Operasional Informasi Pasar Kerja	50,000,000	49,847,007	99,69
B.	Sasaran II <i>Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja</i>			
3.	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	150,000,000	149,845,199	97,45
	Kegiatan : a. Tenaga Kerja Mandiri	150,000,000	149,845,199	99,90
4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	905,000,000	547,639,500	60,51
	Kegiatan : a. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	395,000,000	240,031,000	60,77
	b. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)	150,000,000	147,816,500	98,54
	c. Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah	200,000,000	0	0



		d. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	160,000,000	159,792,000	99,87
	5.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	340,000,000	189,937,799	55,86
		Kegiatan :			
		a. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	190,000,000	189,937,799	99,97
		b. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian	150,000,000	0	0
	C.	Sasaran III <i>Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten</i>			
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	700,000,000	64,860,500	9,27
		Kegiatan :			
		a. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	200,000,000	5,696,000	2,85
		b. Pelatihan Las Dasar	300,000,000	10,501,000	3,50
		c. Pelatihan Scaffolding	200,000,000	48,663,500	24,33
	D.	Sasaran IV <i>Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja</i>			
	7.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	290,000,000	245,427,800	84,63
		Kegiatan :			
		a. Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun	160,000,000	135,841,800	84,90
		b. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	130,000,000	109,586,500	84,30
II	Program Penunjang				
	8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	766,849,000	827,871,700	107,95



		Kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	766,849,000	827,871,700	107.95
	9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	400,000,00	39,953,200	99.88
		Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	40,000,000	39,953,200	99.88
	10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	64,385,000	85.84
		Kegiatan : a. Penyusunan Renja	25,000,000	24,395,800	97.58
		b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	50,000,000	39,989,200	79.97
	11	Program Pengembangan Data/Informasi	70,000,000	59,999,400	85.71
		Kegiatan : a. Operasional Web Ketenagakerjaan dan Perindustrian	70,000,000	59,999,400	85.713
	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,000,000	48,319,260	96.63
		a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	48,319,260	96.63
		TOTAL	3,436,849,000	2,712,975,565	78.93

Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar **Rp. 2.712.975.565** atau **78,93%**, karena ada beberapa kegiatan tidak terlaksana dan yang harus di refocusing sebesar **Rp.723.873.435,-** atau **26,68%**, hal ini disebabkan Pandemi Covid-19.

a. **Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun terdiri 4 Sasaran, 1 satu Sasaran di RPJMD sementara 3 Sasaran di Renstra sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.6

Sasaran Stretegis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran		
			Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1					
	RPJMD				
	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	0	0	0
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	50,000,000	49,847,007	99,69%
	RENSTRA				
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,395,000,000	883,754,498	63.35%
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	700,000,000	64,860,500	9,26%
4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	160,000,000	135,841,800	84,90%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	130,000,000	109,586,000	84,29%

b. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Perencanaan Kinerja dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja (PK) dapat kami sajikan sebagai mana tersebut :

Tabel 3.7
Perencanaan Kinerja dan Anggaran
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targget	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,98%	59,76%	98,00%	0	0	0
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,8%	3,77%	99,21%	50,000,000	49,847,007	99,69%
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	13%	25,36%	195,07%	1,395,000,000	883,754,498	63.35%
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	15,9%	0	0	700,000,000	64,860,500	9,26%
4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPhi)	30%	20%	150%	160,000,000	135,841,800	84,90%



		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,4%	86,70%	244,91%	130,000,000	109,586,000	84,29%
--	--	--	-------	--------	---------	-------------	-------------	--------

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2020 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai mana Tabel berikut :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (4 – 5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	98,00%	0	0
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	99,21%	99,69%	- 0.48%
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	195,07%	63,35%	128,72%
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	0	9,26%	4 9.26%
4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	150%	84,90%	65.1%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	244,91%	84.29%	160.62%



Pada tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal

dengan Indikator :

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memang tidak dianggarkan dikarenakan pelaksanaan kegiatannya sudah dilaksanakan pada tahun 2018 yakni hanya untuk mendapatkan target selama 5 tahun, selanjutnya hanya menunggu realisasinya.
- b. Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal, yang mana kegiatan tersebut untuk mendapatkan data pekerja yang ditempatkan harus dilakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, karna masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan para pekerja yang telah ditempatkan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja dengan

Indikator Tingkat Petumbuhan Wirausaha Baru, yang mana ada beberapa kegiatan telah terjadi refocusing dikarenakan pandemi covid-19, namun ada kegiatan yang tidak direfocusing yakni kegiatan Monitoring yang mana kegiatan tersebut untuk mendapatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Karimun,

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten

dengan Indikator Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten yang mana pelaksanaan kegiatan terjadi refocusing anggaran di karenakan Pandemi Covid-19.



4. ***Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja*** dengan 2 (dua) Indikator juga terjadi refocusing anggaran dikarenakan pandemi covid-19



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2020 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. LKjIP ini juga berperan sebagai tolok ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah, sebagai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka *Good Governance* yang dicita-citakan pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut dimuka merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua elemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, dan atas dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat.

Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun antara lain :

1. Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian;
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta terserapnya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Karimun.



3. Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
4. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, serta Peningkatan Sistem Manajemen Ketenagakerjaan;
6. Terwujudnya pelaksanaan Program Perindustrian yang sinergis untuk pembinaan dan pengembangan Wirausahabaru khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Namun masih terdapat sasaran yang capaian kinerjanya belum terealisasi yakni pada sasaran III *Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten* hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengglobal dan perlu mendapat perhatian serta keseriusan Pemerintah Daerah agar kedepannya bisa teralisasi.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020 ini, diharapkan adanya kesiapan seluruh jajaran dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan *Good Governance* dengan melibatkan stakeholders sehingga tercipta sasaran dan hasil kerja serta akuntabilitas baik kuantitatif maupun kualitatif yang memuaskan.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
JALAN JENDERAL SUDIRMAN GEDUNG GUNUNG PAPAN LANTAI II
TANJUNG BALAI KARIMUN

Email : disnaker.perindustrian@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si
Jabatan : BUPATI KARIMUN
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI KARIMUN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**


DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si


Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,98%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,8 %
2.	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	3.	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	13%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	4.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	15,9%
4.	Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan bagi tenaga kerja	5.	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	30%
		6.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,4%

PROGRAM

ANGGARAN

1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	766.849.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	50.000.000,-
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	40.000.000,-
4.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	700.000.000,-
5.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp.	340.000.000,-
6.	Pengembangan Data/Informasi	Rp.	70.000.000,-
7.	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Rp.	200.000.000,-
8.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	290.000.000,-
9.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	905.000.000,-

10. Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 75.000.000,-

TOTAL ANGGARAN

Rp. 3.436.849.000,-

Tanjung Balai Karimun, Februari 2020

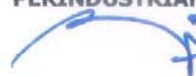
BUPATI KARIMUN,

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN

PERINDUSTRIAN



H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.SI



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc



RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

NO	PK		Target Per TW		Perhitungan Target Indikator	Program						Kegiatan	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW		Target Anggaran	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	I		Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100 persen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	I		I	
			II							II		II	
			III							III		III	
			IV	60,98%						IV		IV	
		Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	I	1,4%	Persentase Penerimaan tahun ini (dikurangi) Persentase Penerimaan tahun lalu	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Operasional Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	15,000,000
			II	2,3%						II		II	25,000,000
			III	3,2%						III		III	35,000,000
			IV	3,8%						IV	1 Dokumen	IV	50,000,000
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	I	3%	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru yang tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya [dibagi] Jumlah Pertumbuhan Wirausahabaru pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Peserta	Orang	I		I	108,976,200
			II	6%			II	20 Orang	II	150,000,000			
			III	9%			III		III				
			IV	13%			IV		IV				
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Peserta	Orang	I		I	170,000,000
										II	60 Orang	II	395,000,000
										III		III	
										IV		IV	
							3. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)	Jumlah Peserta	Orang	I		I	76,594,440
										II	30 Orang	II	150,000,000
										III		III	
										IV		IV	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



							4. Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Expose	Expose	I		I			
							II		II	95,145,000					
							III	2 Expose	III	200,000,000					
							IV		IV						
							5. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	25,000,000		
										II		II	50,000,000		
										III		III	115,000,000		
										IV	1 Dokumen	IV	160,000,000		
						Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	Jumlah Peserta	Orang	I		I	75,000,000		
										II	6 Orang	II	190,000,000		
										III		III			
										IV		IV			
							2. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian	Jumlah Peserta	Orang	I		I			
										II	15 Orang	II	83,749,000		
										III		III	150,000,000		
										IV		IV			
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	I	10,5%	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan berbasis kompetensi (dibagi) Jumlah Peserta Yang mendaftar (dikali)100 persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	Jumlah Peserta	Orang	I		I	15,000,000		
			II	12,8%						II		II	35,000,000		
			III	14,2%						III		III	65,000,000		
			IV	15,9%						IV	70 Orang	IV	200,000,000		
							2. Pelatihan Las Dasar	Jumlah Peserta	Orang	I		I	150,000,000		
										II	25 Orang	II	300,000,000		
										III		III			
										IV		IV			
							2. Pelatihan Scaffolding	Jumlah Peserta	Orang	I		I			
										II		II	50,331,000		
										III	20 Orang	III	200,000,000		
										IV		IV			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	I	8%	Selisih jumlah kasus hubungan industrial tahun ini dikurangi dengan selisih jumlah kasus pada tahun lalu (dibagi) jumlah kasus pada tahun sekarang (dikali) 100 persen	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Pembinaan Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun	Terbitnya Angka UMK	UMK	I		I	15,000,000					
			II	15%						II		II	45,000,000					
			III	22%						III		III	80,000,000					
			IV	30%						IV	Terbit UMK	IV	160,000,000					
			Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	I						20,2%	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (dibagi) Jumlah tenaga kerja (dikali) 100 persen	2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Persentase Pembinaan LKS Tripartit	LKS Tripartit	I		I	10,000,000
				II						25,8%					II		II	35,000,000
				III						30,7%					III		III	75,000,000
				IV						35,4%					IV	LKS Tripartit	IV	130,000,000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I	40,000,000				
											II		II					
											III		III					
											IV		IV					
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	Jenis	I	30 Jenis	I	335,812,150				
											II	30 Jenis	II	403,663,250				
											III	30 Jenis	III	671,039,950				
											IV	30 Jenis	IV	766,849,000				
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I					
											II		II	10,000,000				
											III	1 Dokumen	III	25,000,000				
											IV		IV					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



							2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I	15,000,000
										II		II	25,000,000
										III		III	35,000,000
										IV	2 Dokumen	IV	50,000,000
						Program Pengembangan Data/Informasi	Operasional Web Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I	25,000,000
										II		II	35,000,000
										III		III	45,000,000
										IV	1 Dokumen	IV	70,000,000
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	Unit	I		I	25,000,000
										II	7 Unit	II	50,000,000
										III		III	
										IV		IV	

Tg. Balai Karimun, Februari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

(Signature)

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010



**REALISASI RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020**

NO.	PK		Target Per TW	Realisasi Per TW		Perhitungan Target Indikator	Penjasan Analisis dan Evaluasi	Program	Kegiatan								Analisis Keuangan terhadap Capaian Kinerja				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja				Satuan	Target TW	Realisasi Per TW	Target Anggaran	Realisasi Anggaran								
1	2	3	4	4		5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	I		I	Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100 persen	Sumber data dari BPS Data akan di umumkan BPS pada tgl 26 Febr 2021 Sebagaimana Perhitungan Target TPAK yakni 60,98% sedangkan terealisasi sebesar 59,76% dengan capaian 98,00%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	I		I		I		I		Tidak Tersedianya Anggaran	
			II		II								II		II						
			III		III								III		III						
			IV	60,98%	IV							59,76%	IV		IV						
	Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal		I	1,4%	I	0	Persentase Penerimaan tahun ini (dikurangi) Persentase Penerimaan tahun lalu	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator, maka persentase penerimaan tahun ini sebesar 40,80% sedangkan persentase penerimaan tahun lalu sebesar 44,57% Dengan demikian Realisasi Triwulan IV sebesar 3,77%, dengan capaian 99,21%	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Operasional Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I	15,000,000	I	8,127,000	Dari hasil evaluasi triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 99.69 % dengan capaian kinerja 100% dipergunakan untuk data pencari kerja yang mendaftar dan ditempatkan
			II	2,3%	II	1,52%							II		II	25,000,000	II	8,554,000			
			III	3,2%	III	2,11%							III		III	35,000,000	III	19,406,557			
			IV	3,8%	IV	3,77%							IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	50,000,000	IV	49,847,007	
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	I	3%	I	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru yang tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya [dibagi] Jumlah Pertumbuhan	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator, Pertumbuhan Wirausaha Baru tahun ini berjumlah 1547 IKM (dikurangi) Jumlah Wirausaha Baru tahun lalu berjumlah 1234 (dibagi) Jumlah IKM Tahun lalu 1234 IKM (dikali)	Program Kesempatan dan Perluasan Kerja	1. Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I	108,976,200	I	-	Dari hasil evaluasi triwulan IV, Realisasi Anggaran sebesar 99.90 % dengan capaian kinerja 100% dipergunakan menumbuhkan wirausaha baru (pembuatan sabun) Pelaksanaan	
			II	6%	II						II	20 Orang	II		II	150,000,000	II	130,466,399			
			III	9%	III						III	III	20 Orang	III		III	146,177,199				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

			IV	13%	IV	25,36%	Wirausaha baru pada tahun sebelumnya dikali 100 persen	100 persen, untuk itu realisasinya sebesar 25,36%, sementara capaiannya sebesar 195,07%	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Peserta	Orang	IV		IV		IV		IV		sebelum covid-19
													I		I		I	170,000,000	I	57,031,000	Dari hasil evaluasi triwulan IV Terjadi rasionalisasi Anggaran menjadi 240.031.000 dengan demikian realisasi anggaran 100 % dengan capaian kinerja 100% dipergunakan menumbuhkan wirausaha baru bagi Industri Kecil dan Menengah (pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit) Pelaksanaan sebelum Protokol Covid-19
													II	60 Orang	II	60 Orang	II	395,000,000	II	240,031,000	
													III		III		III		III		
													IV		IV		IV		IV		
										3. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I	76,594,440	I	11,250,000	Dari hasil evaluasi triwulan IV Reliasi Anggaran 98,54% dengan capaian kinerja 100% dipergunakan peningkatan kualitas SDM bagi IKM (Pelaksanaan sebelum Protokol Covid-19)
													II	30 Orang	II		II	150,000,000	II	30,665,000	
													III		III		III		III	84,752,440	
													IV		IV	30 Orang	IV		IV	147,816,500	
										4. Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Expose	Expose	I		I		I		I		Tidak terlaksana Karena Covid-19
													II		II		II	95,145,000	II	-	
													III	2 Expose	III	0	III	200,000,000	III	-	
													IV		IV		IV		IV		
										5. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	I		I		I	25,000,000	I	16,360,000	Dari hasil evaluasi triwulan IV Reliasi Anggaran 99,87% dengan capaian kinerja 100% dipergunakan untuk mendapatkan data pertumbuhan IKM Se-Kabupaten Karimun
													II		II		II	50,000,000	II	25,795,160	
													III		III		III	115,000,000	III	151,000,460	
													IV	1 Dokumen	IV	1 Dokumen	IV	160,000,000	IV	159,792,000	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

									Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I	75,000,000	I	60425000	Dari hasil evaluasi triwulan IV Reliasi Anggaran 99,97% dengan capaian kinerja 100% dipergunakan untuk pembuatan alat berbahan dasar dari laut yakni pembuatan alat produksi kerupuk		
												II	6 Orang	II		II	190,000,000	II	177,117,799				
												III		III	6 Orang	III			III	189,937,799			
												IV		IV		IV			IV				
										2. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		I		Tidak terlaksana Karena Covid-19		
												II	15 Orang	II		II	83,749,000	II	-				
												III		III		III	150,000,000	III	-				
												IV		IV		IV			IV				
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	I	10,5%	I		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan berbasis kompetensi (dibagi) Jumlah Peserta Yang mendaftar (dikali)100 persen	Tidak Terlaksana karena Covid-19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendampingan Pengiriman Peserta ke Balai Pengembangan Latihan Kerja	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I	15,000,000	I	-	Tidak terlaksana Karena Covid-19		
			II	12,8%	II								II	35,000,000	II	5,696,000							
			III	14,2%	III								III	65,000,000	III								
			IV	15,9%	IV								IV	200,000,000	IV								
											2. Pelatihan Las Dasar	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I	150,000,000	I		Tidak terlaksana Karena Covid-19	
							II			25 Orang				II		II	300,000,000	II	10,501,000				
							III							III		III		III					
							IV							IV		IV		IV					
											2. Pelatihan Scaffolding	Jumlah Peserta	Orang	I		I		I		I		-	Tidak terlaksana Karena Covid-19
							II							II		II	50,331,000	II	24,796,000				
							III			20 Orang				III		III	200,000,000	III	39,856,500				
							IV							IV		IV		IV	48,663,500				

4	Meningkatnya Kesejahteraan dan	Persentase Penurunan Angka	I	8%	I		Selisih jumlah kasus hubungan industrial	Sebagaimana Perhitungan Target Indikator yang mana jumlah kasus selesai	Program Perlindungan dan Pengembangan	1.Pembinaan Dewan Pengupahan	Terbitnya Angka UMK	UMK	I		I		I	15,000,000	I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV Realisasi Anggaran sebesar 96,17%
---	--------------------------------	----------------------------	---	----	---	--	--	---	---------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----	---	--	---	--	---	------------	---	--	---



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Perindungan bagi Tenaga Kerja	Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	II	15%	II		tahun ini dikurangi dengan selisih jumlah kasus pada tahun lalu (dibagi) jumlah kasus pada tahun sekarang (dikali) 100 persen	tahun ini sebanyak 6 kasus (dikurangi) jumlah kasus selesai tahun lalu sebanyak 5 Kasus (dibagi) jumlah kasus selesai pada tahun ini 6 kasus (dibagi) 100 persen maka hasil realisasinya sebesar 20,% dengan capaian 150%	Lembaga Ketenagakerjaan	Kabupaten Karimun			II		II		II	45,000,000	II	1,800,000	dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk mendapatkan angka Upah Minimum Kabupaten
		III	22%	III								III		III	80,000,000	III	50,345,000			
		IV	30%	IV	20%							IV	Terbit UMK	IV	Terbit UMK	IV	160,000,000	IV	135,841,800	
	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	I	20,2%	I	0%	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (dibagi) Jumlah tenaga kerja (dikali) 100 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 18.810 Orang (dibagi) jumlah tenaga kerja sebanyak 21.696 Orang maka realisasinya 86,70% dengan capaian 244,91%	2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Persentase Pembinaan LKS Tripartit	LKS Tripartit	I		I		I	10,000,000	I		Dari hasil evaluasi Triwulan IV Realisasi Anggaran sebesar 91.18% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk pertemuan antara Pemda . serikat pekerja/serikat buruh serta pihak-pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perusahaan perusahaan se-Kabupaten Karimun	
		II	25,8%	II	0%						II		II		II	35,000,000	II	24,750,000		
		III	30,7%	III	0%						III		III		III	75,000,000	III	51,750,000		
		IV	35,4%	IV	86,70%						IV	LKS Tripartit	IV	LKS Tripartit	IV	130,000,000	IV	109,586,000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	I	1 Dokumen	I		I		I	40,000,000	I	28,234,300	Dari hasil evaluasi Triwulan IV, maka Realisasi Anggaran sebesar 99,88% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
									II		II		II		II	28,864,700				
									III		III		III		III	39,953,200				
									IV		IV		IV		IV					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional	Jumlah Jenis	Jenis	I	30 Jenis	I		I		I	335,812,150	I	168,480,000	Dari hasil evaluasi Triwulan IV Realisasi Anggaran sebesar 91,47% dengan capaian kinerja sebesar 100% dimana dipergunakan	
									II	30 Jenis	II		II	403,663,250	II	406,916,000				
									III	30 Jenis	III		III	671,039,950	III	554,426,000				



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

													III		III		III		III	48,319,260	100% dimana dipergunakan untuk peningkatan kinerja pegawai
													IV		IV		IV		IV		

Tanjung Balai Karimun, 15 Maret 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

DINAS
TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN

Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671003 199203 1 010